

ABSTRAK

Lutfi Annisa Fitri : Pengelolaan Pajak Air Tanah Di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi (Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi)

Pajak air tanah adalah pemanfaatan dan pengambilan air tanah yang di pungut pajaknya. Pajak ini mengalami masalah yang harus segera diselesaikan. Masalah tersebut terjadi Dimana pengelolaan pajak air tanah yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dilihat secara hasil realisasi penerimaan pajak air tanah belum mencapai target. Selain itu pertumbuhan penerimaan pajak air tanah hampir mengalami penurunan di setiap tahunnya dan kemampuan melaksanakan yang belum tegas terhadap wajib pajak yang masih belum melunasi pajak air tanahnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan pajak air tanah di Kota Bekasi belum optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengenal bagaimana pengelolaan pajak air tanah di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dilihat dari segi hasil, keadilan, daya guna ekonomi, kemampuan melaksanakan, dan kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu sumber data primer dan sekunder yang didapat melalui Teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dengan mengacu pada teori Nick Devas mengenai pelaksanaan pengelolaan pajak air tanah di badan pendapatan daerah kota Bekasi dikatakan belum optimal. Hal ini dapat dilihat dalam kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah, Bapenda Kota Bekasi memberikan tagihan tidak sesuai dengan nominal pajak akibat adanya human error. Selain itu penerimaan Pajak air tanah yang tidak tercapai target disebabkan oleh adanya wajib pajak yang melakukan penghindaran terhadap penagihan maupun pendataan pemakaian air tanah karena fungsi pengawasan yang lemah, beralihnya wajib pajak air tanah ke air dari PDAM, serta adanya wajib pajak yang habis masa berlaku SIPA nya. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan kapasitas keterampilan SDM, menerapkan sistem digital dalam kalkulasi nominal pajak air tanah, menyediakan sosialisasi/desiminasi pembinaan, layanan, advokasi kepada wajib pajak.

Kata Kunci: Pengelolaan, Pajak Air Tanah

ABSTRACT

Lutfi Annisa Fitri : *Groundwater tax management in the Bekasi City Regional revenue Agency (case study of the Bekasi City Regional Revenue Agency).*

Groundwater tax is the use and extraction of groundwater for which tax is levied. This tax has problems that must be resolved immediately. This problem occurs where the management of groundwater tax carried out by the Bekasi City Regional Revenue Agency is seen from the fact that the realization of groundwater tax revenue has not reached the target. Apart from that, the growth in groundwater tax revenue is almost decreasing every year and the ability to implement it is not yet clear regarding taxpayers who still have not paid their groundwater tax. This shows that the management of groundwater tax in Bekasi town is not yet optimal.

This research aims to discover how groundwater tax is managed in the Bekasi City Revenue in terms of results, fairness, economic effectiveness, ability to implement, and suitability as a source of regional revenue. This research apply qualitative research methods by a descriptive oncoming. The data origin take in the research are primary and secondary data acquire by way of data muster techniques, namely observation, debriefing and documentation. Then the data analysis technique put on this research be composed of three action, namely data reduction, data presenment, and pull out conclusions. The research location is the Bekasi City Regional Revenue Agency.

Based on the results and discussion of research referring to Nick Devas' theory regarding the implementation of groundwater tax management in the Bekasi city regional revenue agency, it is said that it is not optimal. This can be seen in its suitability as a source of regional revenue, the Bekasi City Bapenda provides bills that do not match the nominal tax due to human error. Apart from that, groundwater tax revenue that did not reach the target was caused by taxpayers who avoided billing and collecting data on groundwater usage due to weak monitoring functions, the shift of groundwater taxpayers to water from PDAM, as well as taxpayers whose SIPA had expired. his. This can be done by increasing the skills capacity of human resources, implementing a digital system in calculating the nominal groundwater tax, providing outreach/dissemination, coaching, services, and advocacy for taxpayers.

Keyword: *Management, Ground Water TAX*